

Analisis Actor Network Theory dalam Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (Putaran) di Kota Surabaya

Aliefa Rizkya Ananda¹, Nofiro Bening Dwi Wangkasa² Berlian Fauzia Maylani³, Rizki Revashandi Ihsan Laduni⁴, Binti Azizatunnafi'ah⁵

Program Studi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur

Arananye1@gmail.com¹, nbening16@gmail.com²

fauziaamoy25@gmail.com³, rizkireva08@gmail.com⁴,

binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id⁵

ABSTRACT

The establishment of the Women's Empowerment Learning Center Program (PUTARAN) certainly requires a driver or main actor and supporting actors who are the implementers. With the involvement of the main actors and supporting actors, it will cause interaction in realizing the Women's Empowerment Learning Center (PUTARAN) program. This research was compiled with the aim of knowing the role of the main actors in making policies for the Women's Empowerment Learning Center (PUTARAN) program and knowing the interaction between the main actors and supporting actors in realizing it, in order to achieve the fulfillment of the rights of women online motorcycle taxi drivers and people with disabilities in Surabaya City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through interview techniques. This research uses Actor Network Theory according to Callon (1986) which has four groupings, such as problematization, interessement, enrollment, and mobilization. It shows that both in terms of roles and relationships between the main actors and supporting actors interact well, this can be seen from the success of the Women's Empowerment Learning Center Program (PUTARAN) which has been realized in accordance with its duties and functions.

Keywords: Actor Network Theory; Women Empowerment; Putaran Program

ABSTRAK

Terbentuknya Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) tentunya membutuhkan penggerak atau aktor utama dan aktor pendukung yang menjadi pelaksananya. Dengan adanya keterlibatan aktor utama dan aktor pendukung, maka akan menyebabkan terjadinya interaksi dalam merealisasikan program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN). Penelitian ini disusun tentunya bertujuan untuk mengetahui peran aktor utama dalam membuat kebijakan program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) dan mengetahui interaksi aktor utama dengan aktor pendukung dalam merealisasikannya, demi tercapainya pemenuhan hak-hak perempuan pengemudi ojek *online* dan penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara. Penelitian ini menggunakan Teori Jaringan Aktor menurut Callon (1986) yang memiliki empat pengelompokan, seperti *problematization*, *interessement*, *enrollment*, dan *mobilization*. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik dari segi peran maupun hubungan antara aktor utama dan aktor pendukung berinteraksi dengan baik, hal ini terlihat dari keberhasilan Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) yang telah terealisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: Teori Jaringan Aktor; Pemberdayaan Perempuan; Program Putaran

PENDAHULUAN

Istilah gender umumnya dimaknai hanya sebatas memandang dari segi seks yaitu perbedaan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki). Gender mengartikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya sekedar seks atau kodrati Tuhan namun dari terbentuknya konstruksi sosial dan budaya. Nurhasanah & Zuriatin (2023) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang dijadikan landasan dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan melihat dari segi kondisi sosial budaya, nilai dan perilaku, emosional, dan faktor non biologis lainnya. Istilah tersebut mulai dikenal pada abad ke-19 di Prancis, hingga menjadi persoalan umum bagi seluruh negara. Persoalan gender yang terjadi berupa diskriminasi gender disebabkan oleh pembenaran keyakinan yang tertanam dari proses struktur sosial di kehidupan sehari-hari, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban (Muhammad Sholehuddin, 2023). Dengan demikian, munculnya konsep kesetaraan gender untuk menciptakan keadilan dalam berkehidupan sosial.

Konsep kesetaraan gender menggambarkan bahwa perempuan maupun laki-laki dapat menikmati hak di berbagai aspek kehidupan seperti politik hukum, ketenagakerjaan, maupun pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yaitu "keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia". Tujuan munculnya kesetaraan gender untuk menghilangkan terjadinya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak-hak asasi manusia. Perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban diskriminasi terhadap suatu hal, namun korban terbanyak dari diskriminasi gender adalah perempuan. Dengan adanya kesetaraan gender tentunya memberikan keleluasaan akses pada perempuan. Sebab, masyarakat di Indonesia masih awam terhadap kesetaraan gender karena masih melekatnya budaya patriarki hingga menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut terbukti dari rilis World Economic Forum terkait laporan Indeks Kesenjangan Gender Global tahun 2023, menunjukkan Indonesia menempati posisi ke-87 dari 146 negara (Galih Pratama, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum berhasil memenuhi isi dari Peraturan Presiden No.59/2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan salah satu tujuan SDG's yaitu tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Judiasih, 2022).

Berdasarkan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan dan mengalami suatu kondisi kesenjangan. Hal tersebut dapat diketahui bahwa analisis terhadap kesetaraan gender dan tantangan pembangunan didasarkan pada paradigma pembangunan yang hanya mengutamakan faktor ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kemanusiaan (Fuady & Yusnita, 2016). Aspek kemanusiaan yang dimaksud adalah menerima keberadaan dan peran perempuan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Mengingat pernyataan dari Krisnalita (dalam Bangun, 2020) bahwa perempuan berhak memenuhi hak-hak di

bidang politik, kewarganegaraan, pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, dan kesehatan. Ketika seorang laki-laki menyalahgunakan kekuatan dominasinya untuk menghalangi perempuan dalam mendapatkan hak secara penuh, kemungkinan besar akan memicu tindak kekerasan. Kekerasan terjadi karena korban yang mengalaminya tidak mampu melindungi diri dari perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan pelakunya, dan perbedaan gender yang didorong oleh ideologi menimbulkan stereotip yang merendahkan status perempuan secara budaya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh perempuan dan anak. Jumlah untuk korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 5.616 korban, dibandingkan dengan jumlah korban laki-laki yakni sebanyak 1.387 korban. Menurut (Purwanti, 2020) adanya indikasi penyelewengan kekuasaan, dominasi pihak tertentu terhadap pihak lain dan ketimpangan dapat dikonsepsikan sebagai kekerasan.

Kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang, sehingga perempuan saat ini menggunakan kesempatan hak ketenagakerjaan untuk menopang perekonomian keluarga. Pekerjaan yang memberikan kebebasan bagi yang membutuhkan baik perempuan maupun laki-laki salah satunya yaitu ojek *online*. Saat ini, perempuan banyak yang menjadi pengemudi ojek *online* karena dapat dilakukan secara fleksibel dan tanpa kualifikasi yang berat. Pekerjaan tersebut terlihat mudah dan fleksibel namun tidak dapat dipungkiri menimbulkan risiko yang mengancam keamanan diri. Terlebih lagi bekerja di jalanan umum yang rawan adanya pembegalan, hingga penjam-bretan. Mengingat, masih melekatnya stereotip terhadap perempuan yaitu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya menjadi alasan terjadinya kekerasan. Hal tersebut terbukti dari salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Surabaya tahun 2020, di mana pengemudi perempuan ojek *online* yang sedang mencari penumpang di Jalan Darmo Harapan mengalami penjam-bretan hingga menyebabkan korban meninggal dunia (Dian Kurniawan, 2020).

Permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk mengatasinya. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Iskandar, berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada perempuan. Komitmen tersebut diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (P3AK) untuk membuat program pemberdayaan kepada perempuan khususnya perempuan pengemudi ojek *online* dan penyintas kekerasan seksual. Program yang dimaksud bernama Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan gender, serta memberdayakan perempuan di bidang sosial-ekonomi dan politik-hukum. Program tersebut sebagai bentuk pendidikan informal yang berimplikasi pada pengemudi perempuan ojek *online* dan perempuan penyintas kekerasan yang menjadi sasaran program dalam menjaga eksistensi kehidupan dan menghadapi berbagai dinamika di lingkungan luar selama bekerja.

Pembentukan program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) tentunya membutuhkan penggerak atau aktor utama dan aktor pendukung yang menjadi pelaksana. Dengan adanya keterlibatan aktor utama dan pendukung terlihat adanya interaksi yang terjalin dalam merealisasikan program tersebut. Untuk melihat interaksi tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Jaringan Aktor (*Actor Network Theory*). Teori tersebut menurut Callon (1991) mempunyai empat pengelompokan momen yang berawal dari *problematization* atau menentukan urgensi permasalahan pada program pemberdayaan, lanjut pada tahap *interessement* atau penarikan aktor koalisi yang mendukung terselenggaranya pemberdayaan masyarakat, tahap ketiga yaitu *enrollment* atau melibatkan aktor-aktor dengan pembagian tugas, dan tahap terakhir yaitu mobilisasi atau *mobilization*.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Resa Septia Nugroho, Dewi Rostyaningsih, dan Hesti Lestar (2023) tentang “Analisis Networking Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang)”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan jaringan kerja sama antar aktor dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang, dengan adanya dinamika sub unsur kemitraan strategis, sinergi dan simbiosis mutualisme. Temuan dari Dinamika jaringan kerja sama antar aktor tercermin dari belum optimalnya konten transparansi hubungan kerja sama, tidak ada tempat untuk menampung aspirasi aktor di luar institusi, kolaborasi yang belum optimal dan komprehensif, hal tersebut kewenangan yang tumpang tindih antar aktor, permasalahan sumber daya manusia, alokasi pendanaan, dan pemenuhan hak-hak lain yang kurang diperoleh aktor di luar institusi struktur. Sedangkan, penelitian Rachmad Utomo, dkk (2023) dengan judul “Analisis Jaringan Aktor: Upaya Pemerintah Mendorong Masyarakat Belanja Produk UMKM Lokal (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Cirebon Satu)”. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya mendorong masyarakat belanja produk UMKM lokal dengan melihat jejaring aktor yang terlibat, terlihat bahwa inovasi pelayanan publik tersebut muncul karena adanya peran seorang pejabat publik yang bersedia mengambil risiko hingga memperoleh sponsor politik kewilayahannya.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aktor utama dalam pengambilan kebijakan PUTARAN dan berinteraksi dengan aktor pendukung dan merealisasikannya, demi mencapai pemenuhan hak-hak perempuan pengemudi ojek *online* dan penyintas kekerasan di Kota Surabaya.

TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik dapat digambarkan sebagai suatu proses yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan guna mencapai tujuan

tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Desrinelti, et al (2021). Kebijakan adalah upaya dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama serta bentuk jawaban dari permasalahan dengan memanfaatkan fasilitas dan jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan sesuai dengan perkembangan dalam mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan pada suatu wilayah (Sinaga, 2023). Dengan adanya kebijakan memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait suatu permasalahan publik. Oleh sebab itu, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang baik dalam sistematikanya. Kebijakan yang baik tentunya yang secara tertulis untuk dipahami oleh semua orang (Kristian, 2023). Kebijakan publik memiliki ciri-ciri secara umum yaitu terdapat Pembentukan kebijakan harus disertai tujuan bukan hanya sekadar asal membentuk; Kebijakan tentunya tidak berdiri sendiri, namun selalu berkaitan dari kebijakan yang lain karena orientasi dari suatu kebijakan adalah implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; Kebijakan adalah bentuk apa yang akan dilakukan oleh pemerintah; Kebijakan dapat berupa larangan dan pengarahan; dan Kebijaksanaan harus bersandar pada hukum (Isabela, 2022).

Pemberdayaan Perempuan

Kata “pemberdayaan” berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, pemberdayaan adalah proses pemberdayaan dan kekuasaan atau pengalihan kekuasaan dari pihak yang mempunyai kekuasaan kepada pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, pemberdayaan secara umum merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kebaikan masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan melalui kegiatan dan program yang didukung, serta dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemberdayaan merupakan suatu metode penguatan sosial masyarakat dengan meningkatkan kesadaran terhadap pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai keberhasilan (Setiadi & Pradana, 2022).

Pemberdayaan memperkuat kelompok rentan dalam suatu komunitas salah satunya perempuan, dengan memotivasi dan membimbing mereka serta menggali potensi mereka sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Saat ini pemerintah di Indonesia pun gencar membentuk suatu program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan berupaya mencapai kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi kedua jenis kelamin dalam semua aspek pembangunan (Nur S, 2019). Menurut Julianingsih P, et al (2023) pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan guna meningkatkan keterampilan, kreativitas, kemandirian, dan kompetensinya. Dengan demikian, tujuan adanya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan taraf hidup dari segi ekonomi, sosial, politik dan hukum.

Untuk melihat keberhasilan pemberdayaan perempuan, menurut Hubeis (dalam Astutu, 2021) dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu Adanya motivasi dalam diri perempuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, Mengadakan berbagai program yang tepat dan berdaya guna dengan nilai tambah ekonomi bagi

pemberdayaan perempuan, Adanya dukungan penuh dan keterlibatan dari seluruh aparat bersangkutan, Peran aktif dari masyarakat, dan Kesamaan pemahaman terhadap makna pemberdayaan perempuan.

Teori Jaringan Aktor

Menurut Thompson (Sandy, 2020), keterlibatan aktor dalam program dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan kekuasaan dan kepentingannya yaitu 1) aktor sebagai subjek apabila pihak tersebut hanya memiliki kepentingan yang besar namun kecilnya kekuasaan, 2) aktor sebagai pemain kunci apabila memiliki kepentingan dan kekuasaan yang besar, 3) aktor sebagai pengikut lain (*crowd*) apabila memiliki kepentingan dan kekuasaan yang kecil, dan 4) aktor sebagai pendukung apabila hanya memiliki kekuasaan yang besar namun kecilnya kepentingan.

Pemakaian istilah "*Network*" berguna untuk menggambarkan pola relasi antar individu maupun antar kelompok, yang dapat berbentuk bersifat formal atau informal (Martomo, 2020). Dapat disimpulkan istilah "*actor network*" adalah pola yang membentuk suatu hubungan lebih dari satu aktor untuk mencapai kepentingan atau tujuan tertentu. Kemudian, muncul teori jaringan aktor yang dikembangkan oleh Callon pada tahun 1986 serta mendefinisikan sebagai pola jaringan sosio-teknis antara non manusia dan manusia. Teori jaringan aktor menurut Callon (dalam Destriapani, et al., 2021) dapat dilakukan melalui proses translasi terdiri dari empat tahap yaitu :

- (1) *Problematization*, satu aktor atau lebih merumuskan suatu masalah untuk menarik atensi dari aktor lainnya,
- (2) *Interessement*, tahap aktor utama meyakinkan aktor lainnya untuk turut terlibat dengan menyelaraskan kepentingan aktor lain dengan kepentingan aktor utama,
- (3) *Enrolment*, aktor utama melakukan pendelegasian dan pembagian peran tiap aktor-aktor yang telah bergabung,
- (4) *Mobilization*, tahap mengkoordinasikan dan penguatan komitmen aktor-aktor untuk bertindak secara kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kuantitatif umumnya untuk mengukur fenomena secara kuantitatif dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tertentu. Sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer berasal dari hasil wawancara, dan data sekunder berasal dari perolehan informasi akurat dan valid melalui berbagai jenis literatur. Untuk mendapatkan data yang valid melalui teknik wawancara, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan utama yaitu Ibu Ranti, S.Kom., M.Ikom sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur terkait program KSUD bernama Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) yang dianalisis berdasarkan

teori jejaringan. Dalam mengeksplorasi topik penelitian secara jelas dan mendalam, maka peneliti menerapkan fokus penelitian atau membatasi ruang lingkup pengumpulan data sesuai topik. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis peran dan dinamika jejaring aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan hingga implementasi program PUTARAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematization (Urgensi Permasalahan)

Program PUTARAN (Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan) merupakan sebuah solusi untuk memperbaiki capaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) di Jawa Timur masih bernilai 76,59 yang berada di bawah angka nasional. Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah dituntut menjalankan tanggung jawabnya terhadap persoalan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender (IDG) melalui Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur menjadi aktor dalam menjawab persoalan di atas, yang dibuktikan dengan membentuk dan hingga merealisasikan Program PUTARAN. Program tersebut berawal dari Dinas P3AK mengidentifikasi adanya isu kesetaraan gender. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ranti, menyatakan bahwa Dinas P3AK memiliki binaan kelompok perempuan rentan pelecehan seperti Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL), perempuan penyintas kekerasan, adanya kelompok perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, perempuan pekerja ex migran. Dari binaan kelompok tersebut, Dinas P3AK berinovasi membentuk Program PUTARAN untuk memberikan peningkatan kapasitas diri perempuan di berbagai bidang yaitu bidang politik dan hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh sebab itu, Dinas P3AK sebagai aktor utama berinisiatif mengadakan pelatihan-pelatihan pada Program PUTARAN yang berguna untuk kelompok sasaran tersebut dengan dikategorikan bidangnya. Di bidang ekonomi terdapat pelatihan memasak, tata rias, menjahit dan kerajinan tangan. Sedangkan, di bidang sosial terdapat pembinaan rohani Islam, dan rohani Kristen berupa pengajian rutin. Di bidang Hukum terdapat kelas hukum, dan di bidang politik mengadakan kelas politik. Peserta yang menjadi sasaran program tersebut yaitu perempuan ojek *online*, perempuan penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, perempuan eks PMI, perempuan anggota forum anak, dan perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan.

Dalam proses pembentukan inovasi pemberdayaan perempuan ini, tentunya mengalami beberapa konflik terhadap perbedaan perspektif. Menurut Ibu Ranti, konflik tersebut berupa banyaknya masukan/saran yang masuk dari berbagai pihak terhadap pelatihan yang cocok untuk memberdayakan perempuan pada program tersebut. Dengan banyaknya masukan, Dinas P3AK sebagai aktor utama sekaligus penengah maka mengambil jalan tengah yaitu mengadakan pelatihan/pembinaan yang menyesuaikan dengan kemampuan *budget*. Dengan demikian, Program PUTARAN hanya terdiri 20 peserta setiap jenis pelatihan yang ada untuk menyesuaikan anggaran.

Interessement (Penarikan Aktor Koalisi)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tidak perlu melakukan sesuatu hal yang membuat aktor pendukung (perempuan-perempuan ojek *online*) tertarik dari adanya Program Pusat Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) tersebut. Melainkan, mereka sebagai aktor pendukung (perempuan-perempuan ojek *online*) secara inisiatif tertarik atau memiliki rasa ingin mengikuti berbagai kegiatan atau program yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK sesuai amanat yang telah diberikan oleh Gubernur Jawa Timur. Bagi mereka dari berbagai kegiatan yang ada di dalam Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) sangat bermanfaat dan menguntungkan untuk kehidupan atau kondisi mereka saat ini.

Strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk menarik perhatian aktor pendukung (perempuan-perempuan ojek *online*) yaitu, dengan berkomunikasi secara langsung oleh setiap koordinator kesatuan komunitas mereka. Karena dapat diketahui, dalam setiap daerah mereka memiliki koordinator tersendiri. Dari koordinator itulah menginformasikan ke seluruh anggota perempuan-perempuan ojek *online* mengenai program-program yang ada seperti, kegiatan apa yang akan dilakukan, kapan kegiatan itu dilakukan, dan manfaat-manfaat yang akan didapat jika mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, sebagai aktor utama DP3AK juga tidak lupa untuk menginformasikan hal yang menarik dari adanya kegiatan di dalam program yang dilaksanakan atau dapat dikatakan sebagai strategi pendukung agar perempuan-perempuan ojek *online* tersebut semakin tertarik untuk mengikuti program tersebut yaitu, seperti melakukan sebuah pelatihan, mereka akan mendapatkan alat dan bahan bekas pelatihan yang dapat diperoleh secara gratis dan dapat digunakan mereka untuk mengembangkan hasil pelatihan tersebut secara mandiri guna memperoleh upah tambahan di luar penghasilan ojek *online* mereka. Selain itu, bekal ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka ke depannya. Meskipun tidak terdapat intensif atau keuntungan dalam bentuk upah secara langsung mereka sangat antusias.

Enrollment (Pembagian Peran Aktor)

Pada proses pendefinisian peran dan pembagian tugas dalam Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) di Kota Surabaya melibatkan beberapa langkah. Pertama, DP3AK akan melakukan analisis kebutuhan untuk memahami secara mendalam tujuan program dan siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaannya. Kemudian, melalui diskusi dan rapat, mereka akan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing koordinator ojek *online* di setiap daerah sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka. Ini juga melibatkan pembagian tugas yang jelas berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, komunikasi yang efektif dan pemantauan berkala akan membantu memastikan bahwa semua aktor terlibat sesuai dengan yang direncanakan.

DP3AK berhasil meyakinkan para perempuan ojek *online* untuk menerima peran dan tanggung jawab dalam program pusat pemberdayaan perempuan di Kota Surabaya melalui beberapa pendekatan. Pertama, mereka menyampaikan manfaat yang jelas dan konkret dari partisipasi mereka dalam program pelatihan keterampilan seperti di tahun 2022 Zets Chicken dan di tahun 2023 dilimpahkan ke bidang DP3AK ada beberapa lembaga seperti memasak DP3AK bekerja sama dengan Chef Teguh Masterchef Indonesia Season 1, kecantikan bekerja sama dengan ester dan Viva untuk perawatan dan *facial*, setiap hari rabu diadakannya pelatihan bela diri yang bekerja sama dengan ikatan Jijutsu Indonesia untuk dilatih seni pertahanan diri para ojek *online* wanita supaya membela dirinya ketika ada hal-hal yang tidak wajar. Dan diadakannya pengajian setiap hari kamis dengan Muslimat NU dan diadakannya ibadah untuk non muslim GKJW dan WKRI.

Selain itu, DP3AK juga telah membangun hubungan yang kuat dengan komunitas perempuan ojek *online* melalui dialog terbuka, pertemuan tatap muka, dan kerja sama sebelumnya, yang membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan mereka dalam program. Selain itu, DP3AK juga telah mengadopsi pendekatan partisipatif, di mana para pengemudi perempuan ojek *online* terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mereka merasa memiliki dan berkontribusi secara aktif dalam program tersebut.

Proses pembagian peran antara DP3AK dan ojek *online* perempuan yang terlibat dalam Program Pusat Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya mungkin dimulai dengan identifikasi kekuatan, keahlian, dan minat masing-masing pihak. DP3AK dapat bertindak sebagai fasilitator, menyediakan sumber daya, pelatihan, dan dukungan teknis, sementara para perempuan ojek *online* memiliki peran aktif dalam pelaksanaan program, seperti menjadi mentor, mengorganisir acara, dan menyebarkan informasi kepada komunitas mereka. Meskipun dalam pembagian tanggung jawab tersebut, mungkin timbul beberapa konflik terkait ekspektasi yang tidak sesuai atau perbedaan persepsi tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Konflik ini bisa muncul jika tidak ada komunikasi yang cukup atau jika tidak ada kesepahaman yang jelas tentang harapan dan keterlibatan dari awal. Namun, konflik semacam ini bisa diatasi melalui komunikasi terbuka dan kolaboratif antara DP3AK dan para perempuan ojek *online*, dengan menegaskan peran masing-masing pihak dan menyesuaikan mereka sesuai kebutuhan dan kemampuan. Hal ini juga dapat memerlukan kesediaan untuk fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program.

Mobilization (Mobilisasi)

Berbagai permasalahan telah terjadi mulai dari perbedaan kesetaraan gender bahwa anggapan perempuan tidak sepantasnya bekerja dan lemah, hingga pula terciptanya kekerasan yang dilakukan pada perempuan saat bekerja, dengan begitu, Gubernur Jawa Timur mengamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur untuk membentuk sebuah program memberdayakan perempuan (khususnya untuk perempuan yang bekerja atau sebagai kepala rumah tangga/perempuan kelompok

rentan) seperti, perempuan-perempuan ojek *online* bernama Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN). Dalam Program ini pegawai DP3AK memiliki tugas dan fungsi yang sudah terbagi sesuai tanggung jawabnya sehingga implementasi dari adanya program tersebut secara berbagai unsur telah berhasil sesuai tujuan program. Tindakan konkret yang dilakukan DP3AK untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka agar program ini berhasil yaitu pendekatan dan berkomunikasi yang baik kepada koordinator perempuan-perempuan ojek *online* di setiap daerah yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memaparkan setiap bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam Program Putaran tersebut.

Sejauh ini program dapat dikatakan berhasil karena dalam program tersebut DP3AK tidak hanya berdiri sendiri melakukan kegiatan yang ada dalam program, namun ada pihak luar yang ikut membantu atau bekerja sama untuk keberhasilan program putaran tersebut. Seperti, pada mulanya bekerja sama dengan mie burung darah dan hingga banyak aktor-aktor lain yang ikut bekerja sama juga membantu dalam program ini. Sehingga jaringan aktor utama tidak perlu menggunakan strategi dalam meningkatkan kekuatan koalisi sumber daya lainnya sebagai pihak pendukung yang bekerja sama dalam keberhasilan program karena secara nyata mereka secara sukarela dan antusias membantu dalam setiap kegiatan program putaran tersebut, bagi mereka hal memberdayakan perempuan sangatlah utama dan penting tanpa melihat keuntungan yang mereka dapat.

Dalam setiap keberhasilan program hambatan dan tantangan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Dalam Program Pusat Penyedia Layanan Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut seperti, kegiatan seharusnya dilakukan hanya 2 hari karena waktu yang tidak mencukupi dan mengakibatkan mundurnya waktu menjadi 3 hari sedangkan konsumsi hanya tersedia 2 hari saja (tidak tersedianya konsumsi), kekurangan atau tidak cukupnya ruangan saat kegiatan, dan hambatan-hambatan lainnya. Namun, pihak DP3AK menjadikan hambatan tersebut menjadi motivasi dalam perjalanan keberhasilan kegiatan program tersebut. Oleh sebab itu, pihak DP3AK mengkomunikasikan hal tersebut secara langsung dengan para aktor pendukung dan sasaran program (pengemudi perempuan ojek *online*) atas hambatan-hambatan untuk bersama-sama mencari solusi guna lancarnya kegiatan yang akan dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program PUTARAN (Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan) yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IDG) di Jawa Timur yang masih di bawah angka nasional. Program ini fokus pada peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Target utama program ini adalah perempuan ojek *online*, penyintas kekerasan,

perempuan kepala keluarga, dan perempuan eks PMI. DP3AK juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan pelatihan dan mendukung implementasi program ini. Meski terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan waktu dan fasilitas, program ini tetap berjalan dengan baik berkat komunikasi yang efektif dan kerja sama yang kuat antara DP3AK dan para aktor pendukung.

Saran

Setelah melakukan penelitian di DP3AK tentang Program PUTARAN kami memiliki beberapa saran diantaranya DP3AK melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, program dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Selain itu, memperkuat strategi komunikasi dan promosi program menjadi penting untuk menjangkau lebih banyak perempuan yang memerlukan pemberdayaan. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat membantu menyebarkan informasi program dengan lebih luas dan cepat. DP3AK juga terus membangun dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. W. (2021) PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Sahabat Pekon Banjar Manis Dusun V Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus), Repository UIN Raden intan Lampung. UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74–82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>
- Desrinelti, D., Afifah, M. and Gistituati, N. (2021) 'Kebijakan publik: konsep pelaksanaan', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), p. 83. doi: 10.29210/3003906000.
- Destriapani, E., Sarwoprasodjo, S. and Sadono, D. (2021) 'Pemanfaatan Website Desa untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3). doi: 10.22500/9202137657.
- Fadli, M. R. (2021) 'Memahami desain metode penelitian kualitatif', *Humanika*, 21(1), pp. 33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- Isabela, M. A. C. (2022) *Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis*, Kompas.com. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis> (Accessed: 20 May 2024).
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum*

Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 5(2), 284–302.
<https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>

- Julianingsih, P., Din, M. and Lamusa, F. (2023) 'Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Stik Kelor Women Empowerment As An Effort To Improve The Family Economy Through Training In The Making Of Moring Sticks', *JNB: Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(2), pp. 48–57.
- Kristian, I. (2023) 'Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia', *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), pp. 1–144.
- Kurniawan, D. (2020). *Polsek Manunggal tangkap pelaku jambret ZA saat melakukan aksi penjambretan di Jalan Raya Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur*. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4276639/polisi-di-surabaya-tangkap-pelaku-jambret-pengemudi-ojol-yang-meninggal>
- Martomo, Y. P. (2020) 'Actor Networks Theory Formulasi Kebijakan Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Guna Mendukung Pariwisata Kota Surakarta', in *Proceeding SENDIU*, pp. 751–756.
- Nugroho, R. S., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2016). ANALISIS NETWORKING DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang) Resa. *Departemen Administrasi Publik*, 1–23.
- Nur, S. (2019) 'Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesenjangan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup', *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, (1), pp. 99–111. doi: 10.30863/annisa.v10i1.388.
- Nurhasanah, & Zuriatin. (2023). Gender dan Kajian Teori Tentang Wanita. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 282–291.
- Pratama, G. (2024). *Ranking Kesenjangan Gender Indonesia di Posisi ke-87, Naik 5 Peringkat*. <https://infobanknews.com/ranking-kesetaraan-gender-indonesia-di-posisi-ke-87-naik-5-peringkat/>
- Rachmad Utomo, Slamet, K., Sulfan, S., Lintang Theodakta, M., & Sukma Dhaniswara, A. (2023). Analisis Jaringan Aktor: Upaya Pemerintah Mendorong Masyarakat Belanja Produk UMKM Lokal (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Cirebon Satu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 009(01), 31–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap/2023.009.01.4>
- Sandy, O. F. (2020) 'Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6, pp. 415–422.
- Setiadi, Muhammad Bagus; Pradana, G. W. (2022) 'Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit di Kecamatan

Poncol Kabupaten Magetan', *Publika*, 10, pp. 881–894. doi: 10.26740/publika.v10n4.p881-894.

Sholehuddin, M. (2023). *Kesetaraan Gender dan Pemicu Permasalahan*. https://lkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=gender-kesetaraan-gender-dan-pemicu-permasalahan-1

Sinaga, K. (2023) 'DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN WILAYAH YANG BERKELANJUTAN', *Jurnal Publik Reform*, 10(2), pp. 64–71.